

# **URBAN POLITICS KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS)**

**Oleh:**

**A d r i y u s**

**Email : [adriyus90@gmail.com](mailto:adriyus90@gmail.com)**

**Pembimbing : Dr Khairul Anwar M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam Jl. Hr. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293- Telp/Fax 0761-63277

## *Abstract*

### ***Urban Politics Bengkalis ( Policy Studies Bengkalis Government Education Assistance )***

*Education is very supportive of a nation's progress , can be used as the main factor of tingkat the quality of the HR ( Human Resources ) in facing the challenges of the contemporary era .*

*Bengkalis have natural resources of oil earth and crop that delivers the richest counties ranked number two in Indonesia after Kutai Kartanegara. With a large budget each year in excess of the rate of Rp 4 trillion be a tough task for the organizers of the region in allocating the budget post appropriate and not for corruption . Once a year the government budgeted cost of education aid*

*as a flagship program of the Regent supporting Herliyan Saleh in improving the quality of human resources Bengkalis community .*

*Theory proposed by Robert Dahl classifying policy analysis based actor and goals, organized interest groups and the interaction between actors and groups in the areas of policy, supported by Frieden in modern economic politics who observed the role of policy actor . This analysis also uses a decentralized approach in Indonesia , So the political criteria for urban / The Urban Politics exist on regional autonomy as stipulated in Law No. 32 of 2014 . The method used in this qualitative research , to obtain data based on interviews , observations and studies and then presented descriptively .*

*Series of educational assistance policy Pemerintah Bengkalis very banyak terms of budget, but the target accuracy is still far from expectations. The involvement of non - governmental organizations that professional education is necessary in terms of policy formulation which is sometimes neglected by the government . Periodic disbursement , and the seriousness of the government apparatus needs to be improved.*

***Keywords : Urban Politics , Decentralization , Education and Policy***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semangat desentralisasi memberikan sebuah angin segar perubahan dari suatu niat kemandirian berdiri sendiri pemerintahan, baik nasional maupun daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Tentulah ini akan memberikan suatu kontribusi baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari kerja birokrat, terlebih lagi kewenangan desentralisasi tidak hanya melalui pelayanan publik, juga kebijakan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah sendiri.

Tentulah ini menjadi sebuah gerbang pembuka akan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya selama ini diartikan sebagai partisipasi politik hanya menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu saja akan tetapi desentralisasi membawa sebuah warna baru bagi politik, kebijakan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sangat banyak kewenangan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka menjalankan, mengatur serta mengevaluasi kinerja pemerintahan sendiri sesuai dengan badan-badan yang akan dibentuk dengan kebutuhan.

Konsep demokrasi modern sekarang, kebijakan tidak lagi serri-merta di cetuskan oleh para pejabat penyelenggara negara saja melalui perwakilan-perwakilan rakyat yang ada, akan tetapi opini publik (*public*

*opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk ambil andil di dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik (M. Irfan Islamy, 1992: 10)

Berdasarkan amanah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sebelumnya hanya 15% dari APBN/APBD. Maka dalam penganggaran Kabupaten Bengkalis, yang bersemangat menjadikan “Bengkalis Kota Pendidikan”. Tercatat dari APBD tahun 2012 yang disahkan pada 18 Januari 2012 Sebanyak Rp. 4,1 Triliun. Dengan porsi biaya pendidikan 20 %, sebanyak Rp. 840 M. Dengan masing-masing post anggaran terdapat didalamnya ; gaji dan kesejahteraan guru, infrastruktur, sarana dan prasarana, bantuan pendidikan (jaminan pendidikan prestasi, khusus dan beasiswa ).

Ini menjadi nilai yang sangat tinggi dan menjadi magnet tersendiri agar beberapa kalangan terlibat. Keterlibatan kalangan kelompok kepentingan/ *interest group* tentu berlatar belakang pendidikan atau badan pemerintah dan non-pemerintah di bidang pendidikan. Bagaimana interaksi sosial, akomodatif, organisir perorangan dan sinerjisitas kepentingan agar tercapai kepentingan bersama akan menjadi fokus penelitian.

Dalam rangka otonomi daerah tentunya ada beberapa proses penyelenggaraan pemerintah yang ditangani oleh daerah sendiri yang sifatnya

desentralisasi. Kota mempunyai kehidupan politiknya tersendiri, terlepas dari kehidupan nasional dan karenanya bisa menjadi bidang studi dan analisis akademik (*June Sager Speakman "Politik Urban":1122*)

Pendekatan teoritis dalam politik urban (*urban politics*) ini mencakup berbagai subjek ; tata pemerintahan, kebijakan publik, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan, pembangunan, dan sebagainya.

Fokus penelitian yang akan penulis angkat dalam sebuah karya tulis ilmiah ini berupa formalasi kebijakan bantuan pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada saat diundang-undangkan tahun 2011.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu terhadap beberapa gambaran fenomena diatas peran penting untuk meneropong suatu kebijakan dilakukan sangatlah penting, mulai dari penginventarisir kekuatan politik kebijakan, proses terjadi kebijakan, pelaksanaan bahkan proses pengevaluasian dan kekuatan-kekuatan eksternal pemerintah yang turut "menyuguhkan" beberapa tawaran terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini tentunya bukanlah serta merta menjadi tolak ukur dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah eksekutif dan legislatif saja, tetapi ada bagian yang menarik perhatian untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam. Faktor-faktor seperti; Visi- Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memperhatikan pendidikan, anggaran, dukungan *civil society*, koalisi pemenangan Pemilukada dan lain sebagainya.

Beberapa masalah yang secara pengamatan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran pendidikan tinggi, tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. 20% dari APBD hanya berupa bantuan pendidikan yang sifatnya jangka pendek.
- b. Masih banyak post anggaran bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti bantuan biaya pendidikan KAT (Komunitas Adat Terpencil) untuk masyarakat sakai.
- c. Minimnya keterlibatan pihak ketiga (mahasiswa, profesional pendidikan, pelajar dan individu sebagai warga negara)
- d. Keterlibatan kelompok kepentingan dalam hal mencari keuntungan masih banyak terdapat dalam pencairan bantuan pendidikan.
- e. Tidak sesuai dengan amanah UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, jaminan pendidikan dasar 12 tahun bagi setiap warga negara dan dibiayai oleh pemerintah.
- f. Masih terbaginya 20% dari APBD Bengkalis untuk infrastruktur dan operasional yang seharusnya hanya untuk bantuan pendidikan saja.

Maka berdasarkan beberapa pengamatan terhadap Analisis Kebijakan Bantuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011, yang kesemuanya

itu tidak terlepas dari pemangku kebijakan, aktor dan institusi serta *supra-structure* dalam merumuskan kebijakan tersebut, maka kajian ini lebih sifatnya pada kajian politik, karena SKPD dan Badan daerah pelaksana hanya sebagai eksekutor kebijakan dan masyarakat sebagai objek dari kebijakan, akan tetapi hulu kebijakan berada pada dinamika kekuatan-kekuatan politik perkotaan/ *Urban Politik* yang sangat kental tarik-menariknya. Maka dapat dirumuskan masalah yang akan disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan-kekuatan politik apa saja yang turut mempengaruhi pembuatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pendidikan ?
2. Bagaimana cara kekuatan politik turut dalam lingkungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana interaksi antar aktor dan institusi yang terlibat dalam perumusan kebijakan?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### Tujuan:

1. Mendeskripsikan kekuatan sosial politik yang turut mempengaruhi kebijakan pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk Mendeskripsikan formalasi kebijakan dan implementasinya kedalam sebuah kebijakan publik.

##### Kegunaan:

1. Sebagai karya ilmiah yang dapat menembah wawasan

keintelektualan bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

2. Diharapkan nantinya mampu memberikan kontribusi yang membangun kabupaten Bengkalis terutama dibidang pendidikan.

#### D. Kerangka Teori

##### Teori *Urban Politics*

Dalam teori ini akan menjelaskan elemen-elemen didalam system yang akan mempengaruhi warna produk dari sebuah kebijakan pemerintah. Lingkungan politik dalam kebijakan terdapat beberapa factor sebelum membuat sebuah kebijakan. Menurut Robert Dahl(1963) Dalam penelitian politik perkotaan ada cara untuk memahaminya, dengan cara meneliti keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan melacak hal-hal yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dari analisis Dahl tersebut apa yang terjadi dipemerintah kota adalah hasil dari persaingan antar kelompok diberbagai area kebijakan.

##### Teori *Modern Political Economi*

Teori ekonomi politik modern disini akan menggambarkan beberapa perspektif, karena didalam politik perkotaan yang mempengaruhi kebijakan itu adalah beberapa system atau kelompok(institussi), disini akan dibahas tentang personalnya serta cara-cara mengkonsolidasikan kepentingan dalam area kebijakan. Ekonomi politik modern disini menggunakan empat komponen: menjelaskan actor dan tujuannya, menetapkan actor yang terpilih, menentukan bagaimana mereka mengelompokkan dirinya, dan

mengikuti interaksi dengan institusi social lainnya. Jeffry Frieden juga menambahkan bahwa selain dari para aktor/personal dalam pengaruh kebijakan tersebut maka juga ada tujuan aktor/pelaku politik duduk ditataran pembuat kebijakan serta mengkoalisi diri menjadi kekuatan politik yang dapat mempengaruhi setiap kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, termasuk dalam hal ini adalah kapital/pemodal.

Dari pemaparan kerangka teori dalam penelitian ini maka penulis menggunakan *Urban Politic* (Politik perkotaan) untuk mendeteksi pengaruh-pengaruh dalam pembuatan kebijakan berupa institusi yang akan berperan penting didalamnya/ berupa kekuatan sosial baik dalam pemerintahan maupun lembaga lainnya. Sementara analisa teori dengan *Modern Political Economi* (ekonomi politik modern) untuk mengetahui aktor-aktor atau perseorangan yang pengaruhnya sangat besar dalam suatu kebijakan politik pemerintah Kabupaten Bengkalis.

## E. Kajian Terdahulu

Erlis Jon. Skripsi Tahun 2012. *Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2011(Studi Kasus Formulasi Kebijakan Dana Pembangunan Anggota DPRD Provinsi Riau)*.

Fardian Dafri. Skripsi Tahun 2013 *Analisis Proses Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012*.

Sari Mustika Indah. Skripsi Tahun 2008. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pendidikan Sekolah Menengah*

*Atas(Studi Perbandingan Pada SMAN 1 Dengan SMAN 2 Kecamatan Bengkalis) Tahun 2003-2007*.

Jumarni. Skripsi Tahun 2007 *Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Program Pemerintah Dibiidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004*.

## G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh. Kualitas suatu penelitian juga didukung pula oleh proses pengolahan data yang dilakukan. Oleh sebab itu, variabel yang dipergunakan, alat-alat pengumpulan data, desain penelitian, dan alat-alat analisis serta hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitaian harus tersedia. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh metode penelitian.(Pratiwi. *Panduan Penulisan skripsi*: 2009. Halaman 51)

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang artinya adalah proses pemecahan masalah dan pengamatan di lapangan dan menggambarkan objek dan subjek dari setiap kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasakan fakta-fakta yang tampak. Pada umumnya penelitian jenis diskriptif ini merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Yang digunakan adalah proses pentela'ahan dari objek-objek penelitian.

Ada beberapa referensi tentang penelitian deskriptif ini antara lain; menurut Maleong pelaksanaan penelitian diskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus jelas dan lengkap, tanpa banyak detailnya yang tidak penting menunjukkan apa yang penting dan apa yang tidak.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di daerah Kabupaten Bengkalis bertepatan di kota Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten dan pusat pemerintahan. Secara geografis Kabupaten berada jauh dari keramaian penduduk mayoritas warga Kabupaten Bengkalis yaitu di Mandau lebih besar penduduknya dan letak kota Bengkalis pun di pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Malaysia dan Singapura)

## 3. Informan Penelitian

Informasi dari penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa hal, salah satunya adalah dari *informan* yang akan memberikan keterangan pendukung dari penelitian ini. Beberapa gambaran dari siapa saja yang akan menjadi informan ini dapat dianalisis dari rumusan masalah yang telah tertuang sebelumnya, yang merupakan orang yang mengambil andil dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut. Dengan harapan akan

mepresentatifkan dari institusi/korps yang dipimpinnya sehingga akan menjadi acuan dasar penganalisaan selanjutnya.

Dari gambaran pengamatan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka akan didapatkan beberapa informan sebagai berikut :

**Tabel I.1 : Informan**

| No  | Status Informan   | Nama Informan   |
|-----|---|---|
| 1.  | Bupati  | Ir. H.  |
| 2.  | Bengkalis   | Herlian   |
| 3.  | Ketua Komisi  | Saleh   |
| 4.  | IV DPRD (F  | Sofyan S.Pd   |
| 5.  | PDIP)   | Rismayeni   |
| 6.  | Wakil Ketua   | Herman Sani   |
| 7.  | Komisi IV (F  | SH.   |
| 8.  | PD)   | Andi Yusran   |
| 9.  | Kadisdik  | Firdaus   |
| 10. | Bengkalis   | Panca Darma   |
| 11  | Akademisi/<br>Tim pakar<br>Pengamat   | M.<br>Darussalam<br>Suwardino   |
| 12. | Pendidikan  | Wak Dul   |
| 13. | Ketua IPMKB<br>Pekanbaru<br>2012-2014<br>Ketua IPMKB<br>Pekanbaru<br>2010-2012<br>Ketua HPPMS<br>Riau<br>Riau Televisi<br>Dinas<br>Pendidikan | Sekdis,<br>Kepala<br>Program,<br>Kepala<br>Bagian<br>Dikmen,<br>Kasi SLTA<br>Samsul<br>Pegawai<br>Bappeda |
|     | Kesbangpol<br>Bengkalis<br>BAPPEDA<br>Bengkalis   |   |

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari narasumber/ *informan* yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini bisa bersumber dari wawancara, diskusi, ataupun forum-forum seminar yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat didalam penelitian ini. Sementara informannya berlatar belakang pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dan kalangan luar pemerintah yang memahami dan bisa memberikan gagasan/kontribusi terhadap Pendidikan dan analisis kebijakannya didalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Seperti kalangan akademisi dan mahasiswa.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari objek pendukung selain dari personal yang menjadi informan tersebut dan tentunya masih sangat terkait dukungan tulisan ini terhadap apa yang akan diangkat seperti dokumen dan media massa.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik interaksi dan komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan media baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini akan digunakan teknik tersebut yang mendalam dan penganalisaan yang mendalam dari interaksi/komunikasi tersebut.

##### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah upaya penginventarisir data-data pemerintah yang mendukung, seperti yang telah

disampaikan dalam sumber data diatas, berupa dokumen pemerintah, perda yang berkaitan dengan pendidikan, sumber berita media, ataupun situs-situs resmi pemerintah yang dapat menunjang dan memberikan informasi serta penguatan argumentatif didalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisa Data

Setelah beberapa proses tahapan sumber data yang dilakukan dari hasil penelitian itu terkumpul maka data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber datanya.

Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik analisa deskriptif, yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan, kemudian dilakukan interpretasi secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

#### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

##### A. Keadaan Geografis dan Topografi

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 30'Lintang Utara, 56' Lintang Utara, 52' Bujur Timur, 31' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Wilayah Kabupaten

Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

## **B. Demografi**

### **B.1 Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2010 adalah sekitar 2,88 persen. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010 yang dilaksanakan bulan Mei lalu. Dari 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis, tercatat laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kecamatan Pinggir dengan persentase sebesar 5,85 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bantan sebesar 0,72 persen. Di Kecamatan Mandau, meskipun penyebaran penduduknya paling besar yaitu sekitar 43,9 persen namun laju pertumbuhannya di bawah Kecamatan Pinggir dan Bukit Batu hanya sebesar 2,99 persen.

### **B.2 Potensi dan Sumber Daya Alam**

Kabupaten Bengkalis disamping letaknya yang strategis juga mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut hampir menyebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Potensi tersebut antara lain di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan, perternakan, pertambangan dan pariwisata.

## **C. Pemerintahan**

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 20 desa/ kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan 5 desa/kelurahan.

## **DINAMIKA URBAN POLITICS DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN BENKALIS ANTAR AKTOR DAN LEMBAGA**

Dalam bab III ini akan dilakukan pembahasan mengenai skripsi dengan judul yang telah diangkat *Urban Politics* Kabupaten Bengkalis (Studi Kebijakan Bantuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis) yang akan memberikan keterangan lebih lanjut berdasarkan beberapa data yang diperoleh dan akan dibagi ke dalam 3(tiga) sub-bab agar memudahkan proses penganalisaan dan mendefinisikan judul menjadi bagian-bagian yang akan kemudian mudah untuk difahami. Tentunya pada bab

pembahasan ini tidak terlepas dari pondasi awal bab I yang telah dibuat dan merupakan jawaban atas pertanyaan yang tertuang di dalam rumusan masalah. Maka dalam mata pisau tela'ah anailsisnya akan menggunakan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan metode penelitian yang telah ditentukan. Dari bab III ini akan dikupas mendalam menjadi tiga bagian sub bab, antara lain; Kekuatan-kuatan politik Bengkalis, Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam kebijakan bantuan pendidikan Bengkalis, dan Interaksi antar aktor dan institusi dalam mengkoalisiikan diri mencapai tujuan kebijakan.

#### **A. Kekuatan-kekuatan Politik Bengkalis**

- A.1. Bupati dan Wakil Bupati
- A.2. DPRD Bengkalis
- A. 3. Dinas Pendidikan
- A. 4. BAPPEDA
- A. 5. Media Massa
- A.6. HPPMS Riau
- A.7. IPMKB Pekanbaru
- A.8. Lembaga peradilan
- A.9. Tim Pakar
- A.10. Lembaga Non-Pemerintahan lainnya
- A.11. Kelompok kepentingan
- A.12. Partai Politik
- A.13. Warga negara sebagai individu
- A.14. Kekuatan lainnya
- A.15. Konstitusi

#### **B. Pengaruh Kekuatan Politik Dalam Kebijakan Bantuan Pendidikan Bengkalis**

Peran serta berbagai kalangan dalam wilayah kebijakan merupakan

suatu rangkaian tak terpisahkan satu dengan yang lainnya yang merupakan konsekuensi dari negar demokrasi, *urban politics* dalam hal ini memandang perlunya keterlibatan kalangan tertentu yang membidangi disiplin ilmunya sangat dibutuhkan agar produk kebijakan yang dilahirkan akan tepat sasaran, pakar yang berada di bidangnya masing-masing akan menyempurnakan suatu kebijakan, wujud nyata dari desentralisasi, mandiri, mengatur rumah tangga sendiri sebenarnya banyak peran yang mampu dimainkan agar dari rakyat, oleh rakyat dan untk rakyat akan terwujudkan tanpa dengungan slogan belaka. Keterlibatan banyak kalangan yang mengharuskan kesempurnaan dari suatu kebijakan, sementara realisasi, sasaran dan bahkan evaluasi dari masa kemasangat minim dilakukan oleh pemerintah, ini berbanding terbaliknya antara Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Kaya akan hasil alam dan anggarannya dengan kualitas Sumber daya manusianya.

**B.1. Dinas pendidikan**, dalam hal ini adalah suatu perangkat daerah yang berada di bawah Bupati sebagai satuan kerja yang memberikan kermudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pendidikan

**B.2. Persoalan dominasi** dan seberapa kuat kekuatan tersebut berpengaruh maka akan sangat susah mengidentifikasi, jangankan mengidentifikasi seberapa besar pengaruhnya, mengidentifikasi

**B.3. DPRD Bengkalis** dalam hal ini mendapatkan tempat paling tinggi di hati masyarakat dalam hal kekuatan politik yang berpengaruh, selain dari figur kepala daerah, karena posisi

yang representatif dari keterwakilan masyarakat

**B.4. Selain dari kekuatan legislatif,** peranan kepala daerah juga patut menjadi pusat perhatian dari kekuatan politik Bengkalis, walupun dalam kacamata politik perkotaan, peranan kepala daerah hanya sebagai mediator

**B.5. Partai sangat besar peranannya,** seperti telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya bahwa yang akan menjadi salah satu kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan adalah partai politik.

**B.6. Lembaga pengawas** bentukan pemerintah, di bawah koordinasi dinas pendidikan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis akan menjadi warna tersendiri dalam peranan kebijakan, komite pendidikan

**B.7. Keterlibatan pihak ketiga** untuk mengambil untung pribadi atau kelompok sangat minim terjadi, karena keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini adalah dalam upaya sosialisasi, jajak pendapat

**B.8. Pengaruh dari suatu kebijakan** tidak serta-merta berada pada “satu kepala” saja akan tetapi sangat banyak. Peranan dan pengaruh dari luar akan menjadi hal sangat wajar, seperti tuntutan dari masyarakat.

### **C. Interaksi Antar Aktor Dan Institusi Dalam Mengkoalisi Diri Mencapai Tujuan Kebijakan**

Interaksi politik merupakan hubungan-hubungan politik/ non-politik yang menyangkut hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya

interaksi sosial/politik maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

**C.1. Interaksi** antar lembaga/institusi akan menjadi penentu kemana arah dan posisi dominan dari pembuatan kebijakan tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam bidang bantuan pendidikan sebagai wujud nyata dari penyelarasan antara misi seorang Bupati terhadap daerah yang dipimpinnya

**C2. Peranan media massa** juga disini akan sangat penting walau tidak bisa angkat bicara pada saat perumusan kebijakan akan tetapi akan senantiasa “menyoroti” segala langkah pemerintah

**C.3. Mengenai porsi** masing-masing institusi tersebut dan bagaimana media komunikasinya akan sangat mempengaruhi sebanyak apa akan memiliki peran dan pengaruhnya dalam suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

**C.4. Lembaga resmi pemerintah** dalam hal ini tidak mau terlalu banyak perannya diambil alih oleh lembaga lainnya, maka disediakan semacam wadah aspiratif dalam rangka menampung segala bentuk aspirasi mahasiswa dan pelajar, seperti seminar dan diskusi.

**C.5. Harmonisasi Komunikasi** antar lembaga ini akan sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai kebijakan yang lebih baik lagi dalam tahapan selanjutnya. Seperti yang disampaikan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sangat mendapatkan perhatian khusus dari setiap kalangan,

**C.6. Institusi** memiliki peranan dan perseorangan dalam menjalankan komunikasi dua arah dalam

mewujudkan tujuan masing-masing, keterlibatan aktor dan lembaga dalam suatu wilayah kebijakan sangat erat kaitannya terhadap kepentingan

**C.7.Upaya keterlibatan ORMAS/OKP** dalam kebijakan hanya mampu berupa pelaksanaan seminar-seminar dan jajak pendapat yang dilakukan. Beberapa kali pelaksanaan seminar senantiasa diprakarsai oleh IPMKB dan Organisasi tingkat kecamatan lainnya akan tetapi inisiatif mengundang dan mengajak berdiskusi dari aparat pemerintah sangat minim dilakukan bahkan akan mudah diabaikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kualitas pendidikan tidak hanya serta merta didukung oleh anggaran yang tinggi, atau tidak berbanding lurusnya tinggi anggaran dengan peningkatan SDM dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menargetkan 20% lebih setiap tahunnya dalam APBD untuk pendidikan dan peningkatan kualitasnya.

Pergulatan politik juga sangat menarik untuk dipantau, terutama kolisi DPRD, pimpinan eksekutif dan jajaran dinas, serta gerakan *supra-structure* yang turut mewarnainya. Secara garis besar gesekan politik didalam pembuatan kebijakan pendidikan tidaklah menjadi suatu dinamika yang begitu menguras energi dan proses yang panjang, lantaran pendidikan merupakan cita-cita setiap anak bangsa dan pemerintah agar tingkat dan kualitasnya bisa diandalkan dikedepankan menjadi kebanggaan daerah, karena ini bukanlah suatu

kebijakan yang strategis dan tinggi dinamika politiknya maka pemerintahan Bengkulu dalam hal ini DPRD tidak terlalu memprioritaskan pendidikan sebagai kebijakan strategisnya, karena “Bengkalis Kota Pendidikan” tersebut merupakan buah fikir dari seorang Bupati Herliyan Saleh, sehingga DPRD dalam hal ini hanya mendukung dan memberikan perhatian lebih dari segi anggaran sedangkan implementatifnya tetap dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan.

### B. Saran

Berdasarkan kajian karya ilmiah ini, maka akan mampu penulis gambarkan bentuk ideal dari sebuah kebijakan pemerintah terutama dibidang Pendidikan, selain dari meminimalisir kelompok kepentingan yang akan merugikan masyarakat luas juga perlu diperhatikan hal-hal teknis didalam pelaksanaan kebijakan, walaupun nampaknya sepela namun akan berdampak besar dan pengaruh jangka waktu yang panjang.

## Daftar Bacaan

### Buku

- A. Hoogerwerf. 1972. *Politologi: Begrippen en Problemen*, page: 38-39 Alpena an den Rijn: Samson uitgeverij
- Alfian. 1993. *Masalah dalam Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*
- Armis Dali, Dody, dkk. 1992. *8000 Kata Populer Kamus Bahasa Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dahl Robert. *Who Governs?*. New Haven, CT: Yale University Press
- Faisal Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Adicripta
- Islamy Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kompas. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota; Jilid 2*. 2003: Halaman 129
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pratiwi. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi*. Nyutran: Tugu Publisher.
- Ramli, Nadjamuddin. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, halaman 11
- Rintuh Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi*

*Rakyat*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

- Sabatier and Jenkins-Smith, 1993: Ch. 1
- Sager June Speakman “*Politik Urban*”:1122
- Suwarno Wiji. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Tinov Tiyas, Muchid. 2008. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip Unri*. Pekanbaru: Unri Press
- Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

### Karya Ilmiah

- Erlis Jon. Skripsi Tahun 2012. *Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2011(Studi Kasus Formulasi Kebijakan Dana Pembangunan Anggota DPRD Provinsi Riau)*.
- Fardian Dafri. Skripsi Tahun 2013 *Analisis Proses Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012*.
- Sari Mustika Indah. Skripsi Tahun 2008. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pendidikan Sekolah Menengah Atas(Studi Perbandingan Pada SMAN 1 Dengan SMAN 2 Kecamatan Bengkalis) Tahun 2003-2007*.
- Jumarni. Skripsi Tahun 2007 *Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Program*

*Pemerintah Dibidang Pendidikan  
Tahun Anggaran 2004.*

### **Dokumen**

RPJMD (Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah)  
Bengkalis 2010-2015  
Peraturan Daerah Bengkalis Nomor  
09 Tahun 2011  
*Bengkalis Regency In Figures*  
(Kabupaten Bengkalis Dalam  
Angka)  
Profil Kabupaten Bengkalis,  
BAPPEDA 2014  
Profil KESBANGPOL Bengkalis  
Profil Dinas Pendidikan Bengkalis  
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  
Sistem Pendidikan Nasional  
UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  
Organisasi Kemasyarakatan

### **Media Massa**

Harian Riaupos  
Buletin Teladan  
<http://www.bengkaliskab.go.id>  
[http://www.kesbangpolbengkalis.go.i  
d](http://www.kesbangpolbengkalis.go.id)  
<http://www.kabarriau.com>  
<http://www.katakabar.com>  
<http://www.Riauterkini.com>  
<http://www.bengkalisonline.com>